

# Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan Literatur dari Berbagai Negara

Fitra Mardiana<sup>1\*</sup>, Suprayoga<sup>2</sup>, Lily Indah Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Wijaya Putra, Indonesia

<sup>1</sup>[fitramardiana@uwp.ac.id](mailto:fitramardiana@uwp.ac.id), <sup>2</sup>[suprayoga@uwp.ac.id](mailto:suprayoga@uwp.ac.id), <sup>3</sup>[lilyindahpratiwi@uwp.ac.id](mailto:lilyindahpratiwi@uwp.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 4 Desember 2023

Disetujui : 31 Desember 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT

*This research explains the relationship between political connections and CSR disclosure using a library research approach. Through the exploration and integration of findings from 6 previous empirical studies published in reputable journals indexed in Scopus, this study aims to present a more comprehensive understanding of the relationship between political connections and CSR disclosure in various countries. The study results indicate that the connection between political connections and CSR disclosure is influenced by the institutional factors of the country where the company operates. Furthermore, the research also shows that political connections provide benefits to companies in developing, advanced, and transforming economies, but these benefits are more significant in developing countries. This study contributes to expanding the literature on political connections and CSR disclosure by presenting empirical results from various countries. The study suggests topics that should be the focus of future accounting research to review key areas of CSR disclosure literature and identify gaps that need to be addressed.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility Disclosure; Governance; Library Research; Political Connection; Sustainability.

## PENDAHULUAN

Isu tentang *corporate social responsibility* (CSR) semakin berkembang dalam empat dekade terakhir, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap peran perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial (Y. W. Nugrahanti, 2021). Banyak perusahaan besar yang mendapat kritik karena telah menimbulkan beberapa permasalahan sosial dan lingkungan (Nugrahanti & Maharani, 2013). Konsep CSR menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (Bianchi et al., 2019). Adanya konsep CSR, mendorong investor untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor keuangan, tetapi juga konsekuensi sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan ketika melakukan investasi (Ang Swat & Marsella, 2015). Namun demikian, muncul sejumlah kritik terhadap pemberlakuan CSR diantaranya adalah kekhawatiran bahwa praktik CSR merupakan program-program yang tidak berkelanjutan yangmana masyarakat hanya mendapat bantuan, pelayanan atau pelatihan dalam waktu tertentu saja dan tidak secara berkala (Partnership-ID, 2020). Selain itu, program CSR juga kerap dianggap sebagai cara instan untuk memperbaiki citra perusahaan dan justru termasuk kedalam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Porter & Kramer, 2011).

Adanya kritik ini, melatarbelakangi munculnya konsep baru yaitu *Create Shared Value* (CSV) yang dikemukakan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer. Konsep CSV lebih menekankan adanya peluang membangun keunggulan kompetitif dengan memasukkan masalah sosial sebagai bahan pertimbangan utama dalam merancang strategi perusahaan (Partnership-ID, 2020). Menurut Porter & Kramer (2011), salah satu perbedaan antara CSR dan CSV adalah jika

CSR berfokus pada bagaimana “*doing good*”, sementara CSV merupakan integrasi antara aktivitas perusahaan dan bagian dari masyarakat. Namun, berbeda dengan CSR, CSV hingga saat ini belum memiliki kerangka yang pasti untuk bisa menghitung nilai CSV perusahaan (Mohammed, 2013). Hal tersebut menyebabkan CSV belum banyak dilakukan oleh perusahaan. Dream Impact (2022) menyatakan bahwa belum ada negara yang mewajibkan perusahaannya melakukan pengungkapan CSV hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini masih berfokus pada CSR dibanding CSV perusahaan.

Perusahaan yang melakukan CSR umumnya akan mengungkapkan kegiatan CSR melalui laporan keberlanjutan. Pengungkapan CSR terbukti membawa manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan reputasi perusahaan dan kinerja keuangan (Bodhanwala & Bodhanwala, 2018; Famiyeh, 2017; Velte, 2017), meningkatkan nilai pasar (Buchanan et al., 2018), serta kelangsungan hidup perusahaan (Al-Hadi et al., 2019). Bahkan, bursa efek di beberapa negara seperti Indonesia dan China telah mendorong perusahaan publik untuk melakukan aktivitas CSR dan menerbitkan laporan keberlanjutan perusahaan. Karena terbukti membawa manfaat bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi, ruang lingkup, dan kualitas pengungkapan CSR menjadi penting untuk dikaji (Aluchna et al., 2023).

Beberapa peneliti menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh konteks kelembagaan suatu negara (Bianchi et al., 2019; Faisal et al., 2018; Kuo & Yu, 2017) sehingga menimbulkan motif yang berbeda-beda antar perusahaan dalam melaksanakan CSR. Motif ini semakin kuat di perusahaan yang memiliki koneksi politik. Gagasan perusahaan terkoneksi politik berkaitan dengan pembentukan hubungan antara perusahaan dengan kekuatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing pihak yang terlibat (Bianchi et al., 2019). Koneksi politik memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari pemerintah seperti keringanan peraturan (Correia, 2014), keringanan pajak (W. Wu et al., 2012), fasilitas dalam mendapatkan dana talangan (Tao et al., 2017), kemudahan dalam mendapatkan kontrak (Goldman et al., 2013), serta fasilitas dalam mengatasi hambatan untuk memasuki industri (Yao et al., 2018). Untuk memperoleh keuntungan tersebut, perusahaan berupaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah dengan menaati kebijakan pemerintah termasuk dalam hal regulasi terkait pengungkapan CSR. Dengan demikian, pengaturan negara yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian terkait hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR (Bianchi et al., 2019; Huang & Zhao, 2016; Muttakin et al., 2018; Y. W. Nugrahanti, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Huang & Zhao (2016) menguji hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR di negara Tiongkok memperoleh hasil bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki pengungkapan CSR yang lebih baik. Hasil serupa juga diperoleh Bianchi et al. (2019) dengan mengambil pengaturan negara Portugal dan Nugrahanti (2021) dengan menggunakan pengaturan negara Indonesia. Disisi lain, penelitian Muttakin et al. (2018) yang dilakukan dengan menggunakan pengaturan negara Bangladesh memperoleh hasil bahwa perusahaan terkoneksi politik mengungkapkan CSR yang lebih rendah. Dari hasil penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR sehingga dapat diperoleh pemahaman dan gambaran secara umum. Penelitian ini menggunakan metode library research yang digunakan oleh Kuhlthau dalam Mirzaqon & Purwoko (2018). Library research dimulai dari pemilihan topik, kemudian melakukan eksplorasi informasi terkait topik tersebut untuk memperoleh fokus penelitian. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan artikel yang relevan, membaca dan memahami serta mengolah informasi dan menyajikannya. Studi kepustakaan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran bagaimana hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR di beberapa negara.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya (Bianchi et al., 2019; Huang & Zhao, 2016; Muttakin et al., 2018; Y. W. Nugrahanti, 2021), yang menyelidiki hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR menggunakan studi empiris. Penelitian ini mengkaji hubungan tersebut melalui metode library research sehingga memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut. Pertama, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur mengenai koneksi politik dan pengungkapan CSR. Dengan menggunakan library research, penelitian ini dapat mengeksplorasi

dan mengintegrasikan temuan dari penelitian empiris sebelumnya sehingga dapat menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kedua, melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR. Ketiga, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam mengelola koneksi politik dan kebijakan CSR mereka. Pemahaman lebih lanjut tentang hubungan ini dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi CSR yang sesuai dengan konteks kelembagaan tempat mereka beroperasi.

## STUDI LITERATUR

### Landasan Teori

Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara koneksi politik dan pengungkapan CSR adalah sebagai berikut.

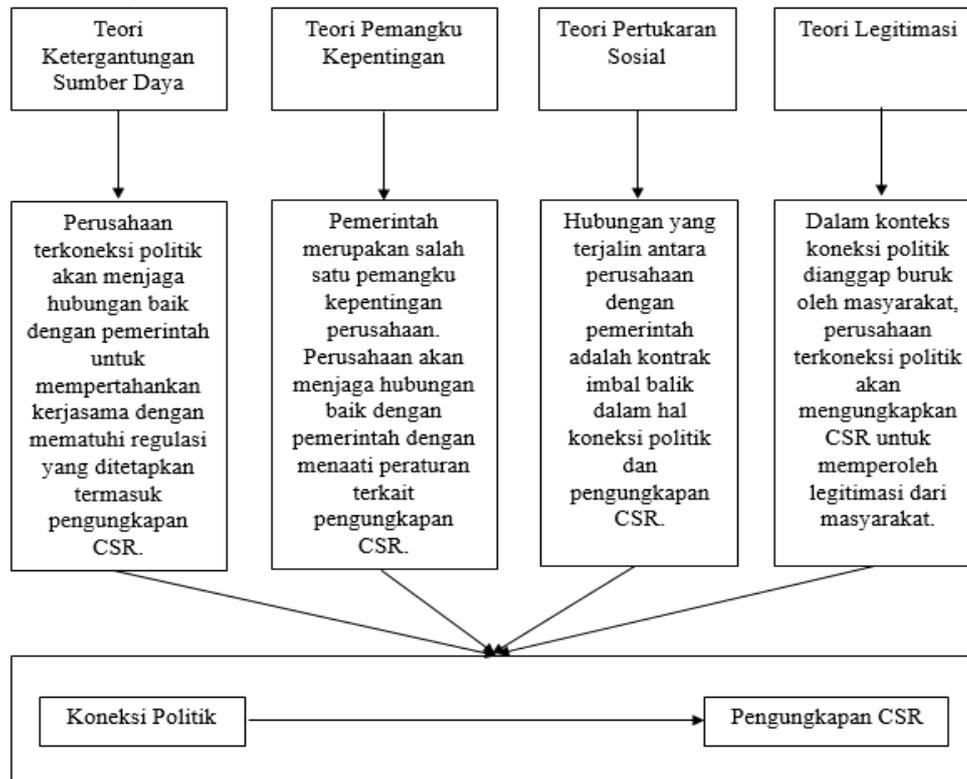
Teori ketergantungan sumber daya (*dependence theory resource*) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan merupakan sistem terbuka dan seluruh sumber dayanya tidak dapat dipenuhi secara internal, maka perusahaan harus memperolehnya dari pihak eksternal. Semakin langka dan penting sumber daya yang diperlukan, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap penyedia sumber daya (Nugrahanti, 2021). Pemerintah adalah salah satu pemasok sumber daya yang langka bagi perusahaan (Huang & Zhao, 2016). Dengan demikian, memiliki koneksi politik dengan pemerintah akan memudahkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pemerintah (Tao et al., 2017). Keuntungan seperti ini akan membuat perusahaan sangat bergantung kepada pemerintah (Huang & Zhao, 2016). Salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah adalah dengan menerapkan pengungkapan CSR karena kegiatan ini merupakan dorongan dari pemerintah (Muttakin et al., 2018).

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) meyakini bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (Nugrahanti, 2021). Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan. Peran utamanya adalah menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, pemerintah memerlukan dukungan formal dan dukungan finansial dari masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan peraturan CSR bagi perusahaan (Huang & Zhao, 2016). Ketaatan terhadap peraturan CSR akan menjaga hubungan baik antara perusahaan yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah. Jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik yang lebih banyak maka ketergantungannya untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintah akan semakin tinggi sehingga pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan juga akan semakin besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap CSR (Huang & Zhao, 2016; D. Li et al., 2016; S. Li et al., 2015; Rahman & Ismail, 2016). Pengungkapan CSR juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik. Perusahaan di Amerika Latin misalnya, melakukan kegiatan CSR untuk mendapatkan legitimasi politik (Joutsenvirta & Vaara, 2015).

Teori pertukaran sosial adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan interaksi sosial sebagai pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan (Selin et al., 2023). Berdasarkan teori ini, hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah merupakan kontrak imbal balik. Ketika perusahaan mempunyai hubungan dengan pemerintah, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengatasi kekhawatiran dan kebutuhan pemerintah. Perusahaan yang berafiliasi secara politik memperoleh sumber daya eksternal dengan mudah dan keuntungan lain melalui koneksi mereka (Joni et al., 2020). Sebagai imbalannya, perusahaan diharapkan mendukung dan menaati kebijakan pemerintah termasuk dalam pengungkapan CSR, untuk menjaga kontrak timbal balik.

Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan atau pantas dalam sistem norma, nilai, keyakinan, dan sistem yang dibangun secara sosial (Bianchi et al., 2019). Para pendukung teori legitimasi mengemukakan gagasan bahwa pengungkapan informasi relevan oleh perusahaan dipicu atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik, dan merupakan alat penting dalam legitimasi tindakan perusahaan (Kent & Zunker, 2013). Kebijakan pengungkapan perusahaan dianggap mewakili metode bagi manajemen untuk mempengaruhi persepsi eksternal tentang aktivitas perusahaannya

(Bianchi et al., 2019). Berdasarkan sudut pandang teori legitimasi, perusahaan seharusnya melakukan aktivitas yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan memberikan informasi kepada anggota masyarakat bahwa aktivitas tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Vourvachis et al., 2016). Dalam konteks dimana koneksi politik dianggap buruk oleh masyarakat, hubungan antara koneksi politik dan CSR adalah positif (Bianchi et al., 2019). Argumentasi yang mendasarinya yaitu melalui pengungkapan CSR, perusahaan terkoneksi politik ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat meskipun memiliki koneksi politik.



Gambar 1. Teori yang Mendasari Hubungan Koneksi Politik dengan Pengungkapan CSR

### Koneksi Politik

Koneksi politik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang politisi yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau seorang wirausaha terlibat dalam aktivitas politik (Faisal et al., 2018). Misalnya, seorang direktur, komisaris, atau pemegang saham suatu perusahaan melakukan kegiatan politik dengan menjadi anggota parlemen, menteri, atau pejabat negara. Suatu perusahaan dikategorikan terhubung secara politik jika seorang politisi yang menjabat sebagai anggota direksi dan komisaris perusahaan tersebut mempunyai hubungan atau jaringan dengan perusahaan tertentu dan/atau afiliasi politik, pengusaha yang memiliki latar belakang politik, atau jika perusahaan berkontribusi pada aktivitas politik dan/atau jika seseorang memiliki hubungan dekat dengan partai politik (Carboni, 2017; Faisal et al., 2018).

Bisnis yang terhubung secara politik merupakan hal yang lumrah di seluruh dunia meskipun hal ini kurang umum terjadi di negara-negara yang menerapkan peraturan ketat terhadap konflik kepentingan politik (Muttakin et al., 2018). Khususnya, hubungan politik perusahaan tersebar luas di negara-negara dengan lingkungan pengaturan yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi (Putra & Harymawan, 2021). Penelitian Muttakin et al. (2018) mencatat bahwa pemilik pabrik di Bangladesh merupakan donor politik yang besar, dan beberapa dari mereka memiliki surat kabar dan stasiun televisi, yang menampilkan berita-berita yang relatif positif mengenai dunia usaha namun mengabaikan isu-isu seperti hak buruh. Studi tersebut juga menemukan bahwa dua pertiga anggota parlemen Bangladesh tergabung dalam tiga asosiasi bisnis terbesar dinegara tersebut.

Dilingkungan dengan tingkat kelembagaan yang lemah dan perlindungan hukum yang rendah, investor asing umumnya takut untuk berinvestasi (Arantes et al., 2023). Hal ini dapat membatasi perusahaan dalam menarik investor asing yang penting (Pang & Wang, 2021). Dengan cara ini, koneksi politik dapat menggantikan institusi hukum, sehingga memungkinkan perusahaan mengakses sumber daya alternatif, seperti informasi atau sumber daya keuangan. Koneksi politik juga memainkan peran penting dalam pendanaan perusahaan di negara-negara dengan institusi hukum yang lemah. Misalnya, koneksi politik memungkinkan perusahaan mendapatkan akses lebih mudah terhadap pinjaman atau pengadaan publik, sehingga dapat membantu mereka meningkatkan kinerja keuangan dan akuntansi (Wu et al., 2018). Oleh karena itu, di negara-negara yang perusahaannya tidak memiliki banyak akses ke investasi asing, dan memiliki lembaga hukum serta perlindungan hukum yang lemah, memperoleh lebih banyak pinjaman lokal atau pengadaan pemerintah dapat menjadi sumber pendanaan yang penting (Arantes et al., 2023).

### Pengungkapan CSR

Pengungkapan CSR mencakup informasi berdasarkan tiga pilar keberlanjutan berikut: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengungkapan CSR disebut juga sebagai pelaporan keberlanjutan, didefinisikan sebagai pengungkapan yang dilakukan sehubungan dengan keberlanjutan, baik yang dilakukan melalui laporan yang berdiri sendiri, laporan terintegrasi, maupun laporan tahunan (Romero et al., 2019). Tren integrasi dan pengungkapan informasi CSR yang pertama kali dimulai pada tahun 1970an dan terus berkembang hingga saat ini. Faktanya, sejak tahun 2011, lebih dari 90% perusahaan G250 melakukan pengungkapan CSR secara publik (KPMG, 2020). Untuk mencapai homogenisasi pelaporan CSR, GRI dianggap sebagai entitas acuan karena melalui pembuatan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan, GRI memberikan panduan dan dukungan kepada perusahaan yang ingin menggunakan bentuk laporan CSR ini (Azevedo et al., 2022). Pedoman ini membahas konten seperti pernyataan misi CEO perusahaan, profil, ringkasan eksekutif dan indikator utama, indikator utama keberlanjutan, visi, strategi dan kebijakan, struktur dan sistem manajemen (Azevedo et al., 2022).

### Kebijakan CSR di beberapa negara

Regulasi yang mengatur terkait penerapan CSR berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara memiliki regulasi yang jelas terkait penerapan CSR seperti Indonesia dan India yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan aktivitas CSR mereka. Disisi lain, beberapa negara juga mendukung penerapan pengungkapan CSR namun masih membebaskan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR perusahaan maupun tidak. Berikut adalah tabel perbandingan penerapan kebijakan CSR di empat negara berbeda sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan CSR di Negara Kanada, China, India, dan Indonesia

	<b>Kanada</b>	<b>China</b>	<b>India</b>	<b>Indonesia</b>
Kategori Negara	Maju	Transmisi	Berkembang	Berkembang
Latar Belakang Penerapan Pengungkapan CSR	Administrator Sekuritas Kanada ( <i>The Canadian Securities Administrators</i> ) telah menyuarakan keprihatinan tentang perlunya mengatur pengungkapan CSR untuk meningkatkan keandalan informasi yang diungkapkan kepada pengguna. Namun demikian, belum semua	Pada tanggal 29 Desember 2007, SASAC, pemegang saham mayoritas dan pemilik utama dari banyak grup bisnis terbesar di Tiongkok, mengeluarkan Pemberitahuan Penerbitan Pedoman Pemenuhan	Liberalisasi perekonomian India terjadi pada tahun 1990an, dan India beralih dari gaya filantropi tradisional ke pendekatan yang lebih melibatkan pemangku kepentingan. Perusahaan menjadi bertanggung jawab memenuhi	Pada masa pemerintahan Habibie (1998 – 1999), perusahaan besar dianjurkan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaannya dengan mendukung

	perusahaan di Kanada diwajibkan melakukan pengungkapan CSR.	Tanggung Jawab Sosial oleh Perusahaan Pusat	kebutuhan kesejahteraan komunitas dan masyarakat melalui CSR.	usaha kecil dan menengah melalui kegiatan CSR mereka.
Landasan Hukum Penerapan Pengungkapan CSR	Public Accountability Statements Regulations SOR/2002-133	The SASAC Law pada tahun 2008	India memperkenalkan pedoman sukarela untuk CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek India, tetapi peraturan ini diubah pada tahun 2013 dan diwajibkan.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/POJK.03/2017, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021
Sifat Pengungkapan	Sukarela kecuali perusahaan yang tercakup dalam SOR/2002-133	Wajib untuk BUMN sejak tahun 2008	Wajib untuk perusahaan publik sejak tahun 2013	Wajib untuk perusahaan publik sejak tahun 2022
Sumber Literasi	(Gosselin & Berthelot, 2023)	(Tang, 2012)	(Oware & Iddrisu, 2022)	(Selin et al., 2023)

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk memperoleh pemahaman dan gambaran umum terkait hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR. Metode *library research* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Kuhlthau dalam Mirzaqon & Purwoko (2018) dengan mengumpulkan dan menelaah informasi dari berbagai sumber seperti artikel, buku, literatur, dokumen, majalah, maupun sumber ilmiah lainnya untuk memperoleh landasan teori dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Penelitian ini mengikuti langkah-langkah melakukan *library research* menurut Kuhlthau dalam Mirzaqon & Purwoko (2018). Pertama, studi ini merencanakan topik yang akan dibahas. Berawal dari isu keberlanjutan perusahaan, studi ini memilih topik koneksi politik dan pengungkapan CSR. Selanjutnya, studi ini mengumpulkan informasi-informasi yang relevan terkait topik penelitian dari berbagai sumber yang kredibel termasuk Scopus, Sinta, Google Scholar, buku, berita, dan peraturan pemerintah yang semuanya diakses secara *online*. Dari informasi yang diperoleh, studi ini kemudian menentukan fokus penelitian yaitu hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR diberbagai negara. Dengan demikian, studi ini mengumpulkan dan mengeksplorasi informasi dari studi empiris tentang koneksi politik dan pengungkapan CSR yang telah diterbitkan dalam jurnal bereputasi terindeks Scopus. Studi ini menggunakan kata kunci berikut untuk memperoleh judul artikel Scopus yang membahas koneksi politik dan pengungkapan CSR.

“Political connection” AND “CSR” OR “Corporate social responsibility”

“Political connection” AND “Sustainability disclosures”

Dari pencarian tersebut, diperoleh sebanyak 12 artikel yang membahas koneksi politik dengan pengungkapan CSR dan 2 artikel yang membahas koneksi politik dan pengungkapan keberlanjutan. Kemudian, studi ini mengecualikan artikel-artikel yang tidak memperoleh akses sebanyak 8 sehingga studi ini menggunakan 6 artikel untuk membahas hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR di berbagai negara. Tabel 2 berisi daftar judul artikel yang digunakan sebagai sumber literatur dalam penelitian ini. Studi ini kemudian menganalisis artikel

tersebut untuk memperoleh gambaran umum terkait hubungan koneksi politik dan pengungkapan CSR dalam kelembagaan negara yang berbeda-beda.

Tabel 2. Daftar Artikel Sumber

Penulis	Judul	Tahun Terbit	Jurnal	Indeks Scopus
Faisal <i>et al.</i>	Political connections and firm performance in an emerging market context: the mediating effect of sustainability disclosure	2021	International Journal of Emerging Markets	Q1
Bianchi <i>et al.</i>	Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal	2019	Journal of Financial Crime	Q1
Muttakin <i>et al.</i>	Corporate political connection and corporate social responsibility disclosure: a neo-pluralist hypothesis and empirical evidence	2018	Accounting, Auditing & Accountability Journal	Q1
Ananzeh <i>et al.</i>	Political connections, ownership concentration, and corporate social responsibility disclosure quality (CSR): empirical evidence from Jordan	2023	International Journal of Disclosure and Governance	Q2
Kuo & Hu	Corporate political activity and environmental sustainability disclosure: the case of Chinese companies	2017	Baltic Journal of Management	Q2
Nainggolan <i>et al.</i>	Political connection and corporate social responsibility: evidence from Indonesia	2021	International Journal of Business and Society	Q3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Penelitian yang membahas hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan *corporate social responsibility* telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan studi empiris dari berbagai negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunieta Anny Nainggolan *et al.* (2021) dan Faisal *et al.* (2018) berupaya memberikan bukti tentang bagaimana koneksi politik berhubungan dengan sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di perusahaan-perusahaan tercatat di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan teori legitimasi sebagai dasar untuk menjelaskan motivasi manajemen dalam mengungkapkan CSR-nya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan CSR lebih besar pada perusahaan yang terkoneksi politik. Perusahaan yang memiliki hubungan politik mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber daya pemerintah, namun perusahaan-perusahaan ini seringkali diawasi dengan ketat, terutama dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya. Perusahaan yang memiliki hubungan politik didorong untuk mempublikasikan laporan tanggung jawab sosialnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan POJK 51/POJK.03/2017. Koneksi politik dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan ketidakpastian lingkungan, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Praktik tanggung jawab sosial yang didukung oleh

strategi politik dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Faisal et al., 2018).

Penelitian Kuo & Yu (2017) menyelidiki hubungan aktivitas politik perusahaan dengan pengungkapan keberlanjutan lingkungan di perusahaan publik China. Pada dasarnya, perekonomian China sedang mengalami transformasi, dimana struktur kebijakan dan pengendalian publiknya juga sedang direformasi untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan ekonomi selama transformasi. Untuk pembangunan dan kelangsungan hidup jangka panjang, dunia usaha diharapkan segera memberikan tanggapan terhadap kebijakan baru pemerintah. Untuk mencapai harapan tersebut, idealnya sebuah perusahaan membutuhkan saluran untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Di China, saluran ini dikenal sebagai Guanxi, yang mengacu pada hubungan khusus antara dunia usaha dan pemerintah. Selain di China yang pemerintahannya dipimpin dan didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok, perusahaan tidak dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui sumbangan kampanye kandidat atau lobi langsung. Akibatnya, dengan mengundang mantan atau pejabat partai yang berkuasa ke dalam dewan direksi suatu perusahaan tampaknya merupakan satu-satunya pendekatan yang layak bagi perusahaan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan atau pengendalian publik oleh pemerintah Tiongkok. Hasil penelitian Kuo & Yu (2017) menemukan bahwa kebijakan pengungkapan lingkungan perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh kuatnya sinyal Guanxi antara perusahaan dan pemerintah. Jika pemerintah China mengadopsi standar yang ketat dan konsisten dalam pengawasan dan hukuman lingkungan hidup, perusahaan yang terkoneksi politik (Guanxi) akan terdorong untuk memimpin perusahaan mereka memenuhi persyaratan kebijakan, membentuk reputasi ramah lingkungan, dan mengurangi risiko operasional melalui pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Bianchi et al. (2019) menyelidiki hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Portugal. Portugal memberikan tempat yang baik untuk mempelajari hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR perusahaan. Kehadiran politisi dan tokoh politik terkemuka di dewan perusahaan merupakan situasi yang lazim terjadi di perusahaan-perusahaan publik di Portugal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mengungkapkan informasi CSR dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Di negara maju seperti Portugal, koneksi politik dipandang sebagai hal yang merugikan kepentingan kolektif pemangku kepentingan, sehingga perusahaan yang menghadirkan koneksi politik diharapkan dapat menangani aktivisme pemangku kepentingan dan kewaspadaan dengan menggunakan praktik CSR dan pelaporannya. Manajer perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung merasa perlu untuk menunjukkannya bahwa meskipun memiliki koneksi politik, perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat, dan hal ini dapat dicapai melalui pelaporan CSR yang baik.

Penelitian Ananzeh et al. (2023) bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan di negara Yordania yang memiliki koneksi politik mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam mengungkapkan informasi CSR dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki motivasi pengungkapan CSR yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pasar modal di negara Yordania ditandai dengan koneksi politik yang kuat sehingga sangat mempengaruhi lingkungan bisnis. Perusahaan-perusahaan Yordania memiliki peluang untuk memanfaatkan akses politik untuk menegosiasikan ketidakpastian politik, seperti menghindari hilangnya legitimasi. Legitimasi politik bermanfaat untuk memastikan akses terhadap sumber daya yang dikendalikan pemerintah dan memastikan perusahaan terlindungi dari pengawasan publik. Dengan demikian, dalam konteks negara Yordania, perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah akan lebih cenderung melakukan pengungkapan CSR karena mereka lebih tunduk pada tekanan pemerintah. Misalnya, intervensi pemerintah dapat mendorong dunia usaha untuk mengikuti perilaku yang baik melalui kegiatan nirlaba seperti kesejahteraan karyawan, pembangunan ekonomi lokal, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung terlibat dalam program CSR yang disponsori oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muttakin et al. (2018) menguji hubungan politik perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR secara sukarela di negara Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik perusahaan berhubungan dengan berkurangnya pengungkapan CSR. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengungkapan CSR sebagai strategi legitimasi berkurang bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik. Peraturan yang mengatur praktik bisnis perusahaan Bangladesh meliputi *Companies Act 1994*, *Income Tax Ordinance, 1969*, dan *Securities and Exchange Rules, 1987*. Namun demikian, baik pernyataan legislatif maupun *Securities and Exchange Rules*, tidak mengamatkan pengungkapan CSR untuk perusahaan publik di Bangladesh. Dengan demikian, pengungkapan CSR di Bangladesh masih bersifat sukarela (*voluntary*). Sebaliknya, Bangladesh dicirikan oleh lingkungan kelembagaan yang lemah, yang menyiratkan keterbatasan pada mekanisme untuk menegakkan perilaku perusahaan yang diinginkan jika kinerja CSR buruk. Dalam konteks seperti ini, perusahaan dapat menggunakan koneksi politik daripada melakukan legitimasi melalui pengungkapan CSR secara sukarela untuk menghindari kemungkinan tantangan legitimasi terlepas dari apakah perusahaan tersebut memenuhi ekspektasi kinerja CSR. Temuan ini mendukung argumen neo-pluralis bahwa hubungan politik dapat memungkinkan perusahaan menghindari tekanan pemangku kepentingan terkait dengan potensi ancaman legitimasi yang berasal dari kinerja CSR yang buruk.

Dari beberapa hasil penelitian empiris tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa baik di negara berkembang (seperti Indonesia, Yordania, dan Bangladesh), negara ekonomi transformasi (seperti China), maupun di negara maju (seperti Portugal), koneksi politik memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan. Namun, keuntungan ini lebih besar di negara berkembang yang memiliki perlindungan hukum yang rendah dan tingkat korupsi yang tinggi. Selain itu, perusahaan terkoneksi politik termotivasi untuk mengungkapkan CSR yang lebih tinggi hanya di negara yang pemerintahannya mementingkan dan memiliki komitmen yang tinggi pada aktivitas CSR dan pengungkapannya atau di negara yang mana masyarakat memandang perusahaan terkoneksi politik memiliki citra yang buruk. Sebaliknya, di negara yang pemerintahannya tidak memiliki komitmen pada pengungkapan CSR seperti Bangladesh, akan mendorong pengungkapan CSR yang lebih rendah di perusahaan terkoneksi politik.

### KESIMPULAN

Penelitian ini memaparkan hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR dengan menggunakan metode *library research*. Studi ini mengeksplorasi dan mengintegrasikan temuan dari penelitian empiris sebelumnya sehingga dapat menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR dari berbagai negara. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR dipengaruhi oleh faktor kelembagaan negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Studi ini tentunya memiliki keterbatasan yaitu studi ini hanya memasukkan beberapa penelitian terkait hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti ketiadaan akses pada beberapa artikel yang terbit di jurnal bereputasi namun berlangganan. Hal tersebut mungkin berdampak pada kegagalan penelitian ini untuk memperoleh gambaran koneksi politik dengan pengungkapan CSR secara keseluruhan.

Studi ini memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas *literature review* terkait hubungan koneksi politik dengan pengungkapan CSR dengan menambahkan temuan-temuan dari negara yang berbeda yang belum tercantum pada penelitian ini. Kedua, studi selanjutnya juga dapat memperluas cakupan penelitian terkait hubungan CSR pada kemanusiaan, profit perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Ketiga, untuk penelitian empiris, studi ini menyarankan penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel moderasi yang dapat memperlemah (memperkuat) hubungan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR seperti *corporate social responsibility assurance* (*CSR assurance*). Asuransi eksternal dapat mensyaratkan adanya audit atau verifikasi independen terhadap laporan keberlanjutan. Hal ini dapat membantu memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang dilaporkan sehingga keterlibatan dalam pengungkapan CSR tidak hanya berfokus pada kuantitas melainkan juga mencakup kualitas informasi yang disajikan.

**REFERENSI**

- Al-Hadi, A., Chatterjee, B., Yafthian, A., Taylor, G., & Monzur Hasan, M. (2019). Corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle: evidence from Australia. *Accounting & Finance*, 59(2), 961–989. <https://doi.org/10.1111/acfi.12277>
- Aluchna, M., Roszkowska-Menkes, M., Jastrzębska, E., & Bohdanowicz, L. (2023). Sustainability reporting as a social construct: the systematic literature review within socio-political view. *Social Responsibility Journal*, 19(8), 1535–1554. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2022-0231>
- Ananzeh, H., Al Shbail, M. O., Al Amosh, H., Khatib, S. F. A., & Abualoush, S. H. (2023). Political connection, ownership concentration, and corporate social responsibility disclosure quality (CSR/D): empirical evidence from Jordan. *International Journal of Disclosure and Governance*, 20(1), 83–98. <https://doi.org/10.1057/s41310-022-00167-z>
- Arantes, V. A., Dicko, S., & Soares, R. O. (2023). Firms' political connections and performance in Brazil and Canada: an analysis of the effect of country institutional factors. *Journal of Management and Governance*. <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09666-1>
- Azevedo, G., Fernandes, R., & Borges, M. F. (2022). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Portugal. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(4), 1–23.
- Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1203–1215. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0111>
- Bodhanwala, S., & Bodhanwala, R. (2018). Does corporate sustainability impact firm profitability? Evidence from India. *Management Decision*, 56(8), 1734–1747. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0381>
- Buchanan, B., Cao, C. X., & Chen, C. (2018). Corporate social responsibility, firm value, and influential institutional ownership. *Journal of Corporate Finance*, 52, 73–95. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.07.004>
- Carboni, M. (2017). *The Financial Impact of Political Connections*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-52776-5>
- Correia, M. M. (2014). Political connections and SEC enforcement. *Journal of Accounting and Economics*, 57(2–3), 241–262. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.04.004>
- Faisal, F., Andiningtyas, E. D., Achmad, T., Haryanto, H., & Meiranto, W. (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission disclosure: Evidence from Indonesian companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(6), 1397–1406. <https://doi.org/10.1002/csr.1660>
- Famiyeh, S. (2017). Corporate social responsibility and firm's performance: empirical evidence. *Social Responsibility Journal*, 13(2), 390–406. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2016-0049>
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2013). Politically Connected Boards of Directors and The Allocation of Procurement Contracts. *Review of Finance*, 17(5), 1617–1648. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs039>
- Gosselin, A. M., & Berthelot, S. (2023). Determinants of voluntary CSR reporting reliability – evidence from Canada. *Journal of Global Responsibility*, 14(2), 177–199. <https://doi.org/10.1108/JGR-03-2022-0031>
- Huang, H., & Zhao, Z. (2016). The influence of political connection on corporate social responsibility—evidence from Listed private companies in China. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40991-016-0007-3>

- Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia. *The British Accounting Review*, 52(3), 100878. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100878>
- Joutsenvirta, M., & Vaara, E. (2015). Legitimacy Struggles and Political Corporate Social Responsibility in International Settings: A Comparative Discursive Analysis of a Contested Investment in Latin America. *Organization Studies*, 36(6), 741–777. <https://doi.org/10.1177/0170840615571958>
- Kent, P., & Zunker, T. (2013). Attaining legitimacy by employee information in annual reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1072–1106. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1261>
- KPMG. (2020). *The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2020*. International Global Sustainability Services, Amsterdam. [https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/be/pdf/2020/12/The\\_Time\\_Has\\_Come\\_KPMG\\_Survey\\_of\\_Sustainability\\_Reporting\\_2020.pdf](https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/be/pdf/2020/12/The_Time_Has_Come_KPMG_Survey_of_Sustainability_Reporting_2020.pdf)
- Kuo, L., & Yu, H.-C. (2017). Corporate political activity and environmental sustainability disclosure. *Baltic Journal of Management*, 12(3), 348–367. <https://doi.org/10.1108/BJM-07-2016-0149>
- Li, D., Lin, H., & Yang, Y. (2016). Does the stakeholders – corporate social responsibility (CSR) relationship exist in emerging countries? Evidence from China. *Social Responsibility Journal*, 12(1), 147–166. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2015-0018>
- Li, S., Song, X., & Wu, H. (2015). Political Connection, Ownership Structure, and Corporate Philanthropy in China: A Strategic-Political Perspective. *Journal of Business Ethics*, 129(2), 399–411. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2167-y>
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK UNESA*, 1–8.
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate political connection and corporate social responsibility disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 725–744. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078>
- Nugrahanti, Y., & Maharani, O. (2013). Firm characteristics toward corporate social responsibility disclosure and its impact on financial performance. *Journal of Management and Business*, 12(1), 128–142.
- Nugrahanti, Y. W. (2021). Do political connection and corporate governance mechanism increase corporate social responsibility disclosure? *International Journal of Applied Business Research*, 3(2), 116–134.
- Oware, K. M., & Iddrisu, A.-A. (2022). Moral capital of CSR and firm performance: Does a shift from voluntary to mandatory policy matter in an Indian context? *Society and Business Review*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1108/SBR-03-2021-0041>
- Pang, C., & Wang, Y. (2021). Political connections, legal environments and firm performance around the world. *International Journal of Finance & Economics*, 26(3), 4393–4409. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2021>
- Putra, F. K. G., & Harymawan, I. (2021). Political connections: a literature review approach. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 83. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2327>
- Rahman, I. M. A., & Ismail, K. N. I. K. (2016). The effects of political connection on corporate social responsibility disclosure-evidence from listed companies in Malaysia. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 16–21.

- Romero, S., Ruiz, S., & Fernandez-Feijoo, B. (2019). Sustainability reporting and stakeholder engagement in <scp>Spain</scp>: Different instruments, different quality. *Business Strategy and the Environment*, 28(1), 221–232. <https://doi.org/10.1002/bse.2251>
- Selin, M., Joni, J., & Ahmed, K. (2023). Political affiliation types and corporate social responsibility (CSR) commitment: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(1), 24–39. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2021-0109>
- Sharma, S. G. (2009). Corporate social responsibility in India: an overview. *The International Lawyer*, 43(4), 1515–1533.
- Tang, B. (2012). Contemporary Corporate Social Responsibility (CSR) in China: A Case Study of a Chinese Compliant. *Moral Cents*, 1(2), 13–22.
- Tao, Q., Sun, Y., Zhu, Y., & Yang, X. (2017). Political Connections and Government Subsidies: Evidence from Financially Distressed Firms in China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(8), 1854–1868. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1332592>
- Velte, P. (2017). Does ESG performance have an impact on financial performance? Evidence from Germany. *Journal of Global Responsibility*, 8(2), 169–178. <https://doi.org/10.1108/JGR-11-2016-0029>
- Vourvachis, P., Woodward, T., Woodward, D. G., & Patten, D. M. (2016). CSR disclosure in response to major airline accidents: a legitimacy-based exploration. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(1), 26–43. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2014-0080>
- Wu, H., Li, S., Ying, S. X., & Chen, X. (2018). Politically connected CEOs, firm performance, and CEO pay. *Journal of Business Research*, 91, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.003>
- Wu, W., Wu, C., & Rui, O. M. (2012). Ownership and the Value of Political Connections: Evidence from China. *European Financial Management*, 18(4), 695–729. <https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2010.00547.x>
- Yao, M., Song, C., & Song, Z. (2018). State ownership, political connections and entry barriers: evidence from China. *Applied Economics Letters*, 25(17), 1250–1254. <https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1414928>
- Yunieta Anny Nainggolan, Endang Dwi Astuti, Raden Aswin Rahadi, & Kurnia Fajar Afgani. (2021). Political Connection and Corporate Social Responsibility: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 922–940. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3767.2021>